

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN RESIKO
BENCANA ABRASI DI PANTAI ANCOL MARAS
KABUPATEN SELUMA**

Oleh :
Sri Indarti*, **Siska Julia Ahirah**

Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Kampus 4 Jalan H.
Adam Malik Kota Bengkulu

*Koresponden: sriindarti@umb.ac.id

ABSTRAK

Bencana abrasi menjadi perhatian serius di berbagai wilayah pesisir, termasuk di Pantai Ancol, Kabupaten Seluma. Fenomena ini tidak hanya mengancam ekosistem pantai, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Permasalahan abrasi yang semakin mengkhawatirkan, sehingga diperlukan kebijakan penanggulangan yang efektif untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan resiko abrasi di Pantai Ancol Maras Kabupaten Seluma. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan resiko abrasi belum sepenuhnya berjalan dengan baik berdasarkan indikator implementasi kebijakan. Indikator komunikasi dalam kebijakan penanggulangan abrasi di Pantai Ancol cukup baik, namun sosialisasi khusus abrasi belum ada. Pemerintah desa dan BPBD merencanakan pemasangan batu penahan ombak dan penanaman mangrove, tetapi hanya pemasangan batu yang terealisasi. Indikator pelaksanaan kebijakan belum optimal, dengan keterlibatan BPBD, Pemerintah Desa, Dinas Sosial, dan Karang Taruna, namun belum ada lembaga yang rutin menangani abrasi. Indikator sasaran kebijakan belum tercapai, abrasi semakin parah meski ada batu penahan ombak. Masyarakat aktif berpartisipasi dalam sosialisasi, tetapi masih kurang pengetahuan tentang penanggulangan abrasi.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan; Penanggulangan Abrasi; Pantai Ancol.

Abstract

Abrasion disasters are a serious concern in various coastal areas, including Ancol Beach, Seluma Regency. This phenomenon not only threatens the coastal ecosystem, but also has an impact on the social and economic life of the surrounding community. The problem of abrasion is increasingly worrying, so effective mitigation policies are needed to reduce the impact. This research aims to determine the implementation of abrasion risk management policies at Ancol Maras Beach, Seluma Regency. The research method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The research results show that the implementation of abrasion risk management policies has not gone completely well based on policy implementation indicators. Communication indicators in the abrasion management policy at Ancol Beach are quite good, but there is no specific socialization on abrasion yet. The village government and BPBD planned to install wave-blocking stones and plant mangroves, but only the stone installation was realized. Indicators for policy implementation are not yet optimal, with the involvement of BPBD, Village Government, Social Services, and Karang Taruna, but there is no institution that routinely handles abrasion. Indicators that policy targets have not been achieved, abrasion is getting worse even though there are waves-blocking rocks. The community actively participates in outreach, but still lacks knowledge about abrasion prevention.

Keywords: *Policy Implementation; Abrasion Management; Ancol Beach.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan sekitar 17.500 pulau, memiliki perairan seluas 5,8 juta km², dengan dua pertiga wilayahnya berupa laut dan garis pantai sepanjang 81.000 km, termasuk yang terpanjang di dunia. Mengingat banyaknya daerah rawan bencana, upaya membangun masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi bencana menjadi sangat penting. Dari sekitar 83.000 desa dan kecamatan di Indonesia, sekitar 53.000 di antaranya berada di wilayah dengan risiko bencana tinggi (Juliswara dkk, 2022).

Wilayah pesisir merupakan area peralihan antara laut dan daratan yang mengalami tekanan akibat berbagai aktivitas dan fenomena dari kedua lingkungan tersebut. Dari daratan, faktor seperti erosi, banjir, serta aktivitas manusia, termasuk pembangunan permukiman, pembukaan hutan untuk pertanian, dan pembangunan tambak, mempengaruhi ekosistem pesisir. Sementara itu, dari laut, pasang surut dan gelombang badai juga berdampak pada kondisi pesisir (Permatasari, 2021).

Wilayah pesisir berperan sebagai pusat pemerintahan, permukiman, industri, pelabuhan, tambak, pertanian, dan pariwisata. Beragam fungsi ini meningkatkan permintaan akan lahan dan infrastruktur, yang dapat memicu berbagai permasalahan baru. Salah satu dampaknya adalah perubahan morfologi pantai, seperti abrasi dan akresi (Rachmalia, 2021).

Erosi pantai atau abrasi semakin meningkat di berbagai daerah. Abrasi terjadi akibat

pengikisan daratan di pesisir oleh gelombang, arus, dan pasang surut air laut. Selain itu, pemadatan tanah turut menyebabkan penurunan permukaan, memicu genangan air laut dan perubahan garis pantai. Abrasi berlangsung ketika jumlah sedimen yang masuk ke suatu area lebih besar dibandingkan dengan yang terbawa keluar (Harisma, 2023).

Memahami faktor penyebab, risiko, dampak, serta kerentanan sosial terhadap abrasi sangat penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi mitigasi. Abrasi terus meluas setiap tahun, mengancam wilayah daratan. Namun, banyak masyarakat tetap memilih bertahan di area terdampak, sehingga diperlukan upaya pengurangan risiko bencana, khususnya abrasi (Kurniasari, 2022).

Menurut Browne dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2002), implementasi merupakan proses pengembangan aktivitas yang saling menyesuaikan. Dalam konteks pengurangan risiko bencana, implementasi kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya nyata untuk mencegah dan mengurangi dampak abrasi di pesisir. Kebijakan ini umumnya mencakup langkah-langkah mitigasi, adaptasi, dan restorasi lingkungan pesisir.

Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 9 Desember 2020 melaksanakan Pilkada untuk memilih Bupati dan wakilnya serta memilih Gubernur dan wakilnya. Peran serta masyarakat untuk mensukseskan Pilkada sangat penting. Salah satu peran tersebut adalah memberikan hak suara kepada salah satu peserta Pilkada. Masyarakat yang memiliki

hak memilih adalah minimal berusia 17 tahun. Usia 17 tahun tersebut merupakan pemilih pemula.

Perda Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2015 mengatur penanggulangan bencana daerah melalui pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Regulasi ini bertujuan memperkuat koordinasi antarinstansi serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengurangi risiko bencana. Perda tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yang menjadi dasar hukum nasional dalam pengelolaan bencana, mencakup jenis bencana, tahapan penanggulangan, serta pembentukan BNPB dan BPBD untuk melindungi masyarakat dan membangun sistem manajemen bencana yang tangguh.

Pantai Ancol di Kabupaten Seluma, Bengkulu, merupakan kawasan pesisir yang rentan terhadap abrasi. Peningkatan abrasi di wilayah ini berdampak serius pada ekosistem, permukiman, serta mata pencarian masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan penduduk yang bergantung pada sumber daya pesisir. Kerusakan garis pantai dan berkurangnya luas daratan tidak hanya mengancam infrastruktur, tetapi juga menimbulkan risiko sosial-ekonomi yang besar.

Pemerintah Kabupaten Seluma telah mengimplementasikan kebijakan pengurangan risiko abrasi sebagai langkah mitigasi untuk melindungi wilayah pesisir dan menjaga keseimbangan lingkungan. Kebijakan ini mencakup pembangunan infrastruktur perlindungan pantai, seperti pemecah gelombang dan penanaman

mangrove, guna mengurangi laju abrasi dan memperkuat garis pantai. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan pesisir serta pemahaman tentang dampak abrasi menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaannya.

Hasil observasi awal di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Seluma belum optimal dalam membangun fasilitas perlindungan pantai. Hingga kini, pemasangan batu pemecah ombak baru mencapai sekitar 40%, sehingga abrasi masih sering terjadi. Salah satunya pada 1 Desember 2024, ketika curah hujan tinggi memicu abrasi. Akibatnya, sebagian batu pemecah ombak tenggelam, membuat abrasi tetap sulit dikendalikan.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penanggulangan abrasi di Pantai Ancol, di mana dampaknya yang semakin meluas membutuhkan langkah lebih tegas dari pemerintah, aparat desa, dan masyarakat. Meski telah ada upaya dari berbagai pihak, tindakan yang dilakukan sejauh ini masih belum cukup efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis permasalahan dengan menggambarkan kondisi objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada saat ini. Menurut Wiratha (2006) penelitian deskriptif berfokus pada analisis yang bersifat deskriptif dengan penyajian dan analisis fakta secara terstruktur. Pendekatan ini bertujuan untuk

menyajikan informasi secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

Menurut Moleong (2016) penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, mencakup perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Pendekatan ini bersifat deskriptif serta disampaikan melalui kata-kata dan bahasa sebagai bentuk ekspresi. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengungkap fakta terkait implementasi kebijakan pengurangan risiko abrasi di Pantai Ancol Maras, Kabupaten Seluma.

Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh David C. Korten dalam Tarigan (2008) sebagai pisau analisis. David C. Korten menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada keselarasan tiga elemen implementasi. Pertama, kebijakan harus memenuhi kebutuhan kelompok sasaran. Kedua, kebijakan harus selaras dengan organisasi pelaksana, terutama dalam hal kapasitas organisasi untuk menjalankan tugas yang diperlukan. Ketiga, harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana agar manfaat program dapat diterima sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh kelompok sasaran.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni untuk memahami implementasi kebijakan penanggulangan abrasi di Pantai

Ancol Maras, Kabupaten Seluma, bagian ini akan menganalisis tanggapan informan terkait indikator-indikator yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam menilai implementasi kebijakan penanggulangan abrasi di Pantai Ancol Maras, Kabupaten Seluma, penelitian ini mengacu pada Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh David C. Korten dalam Tarigan (2008). Teori ini terdiri dari tiga indikator utama: Kebijakan, Organisasi Pelaksana, dan Sasaran Kebijakan. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing indikator disajikan sebagai berikut.

Kebijakan

Menurut Carl Friedrich dalam Rahma (2022), kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam pelaksanaannya, kebijakan menghadapi berbagai tantangan, hambatan, dan peluang. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi kendala yang ada serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kebijakan dalam implementasi penanggulangan abrasi di Pantai Ancol Maras, Kabupaten Seluma, menilai program atau kegiatan yang telah dilakukan untuk mengurangi risiko abrasi. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi apakah pihak terkait mengadakan rapat atau sosialisasi sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana.

Hasil wawancara dan penelitian lapangan menunjukkan bahwa dalam upaya menanggulangi risiko abrasi, pemerintah daerah dan BPBD telah merencanakan dua

program, yaitu penanaman mangrove dan pemasangan batu penahan ombak. Namun, dalam implementasinya, hanya pemasangan batu penahan ombak yang telah terealisasi, sementara penanaman mangrove belum terlaksana hingga saat ini.

Sosialisasi khusus mengenai penanggulangan risiko abrasi belum pernah dilakukan hingga saat ini. Namun, sebelumnya telah diadakan sosialisasi umum yang membahas berbagai risiko bencana, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, gelombang ekstrem, dan abrasi. Sosialisasi tersebut lebih menekankan pada upaya pencegahan dan mitigasi bencana secara keseluruhan, tanpa memberikan fokus khusus pada abrasi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan risiko abrasi di Pantai Ancol Maras, Kabupaten Seluma, dan mengacu pada teori implementasi kebijakan David C. Korten dalam Tarigan (2008), indikator *kebijakan* menunjukkan bahwa pelaksanaannya telah dimulai dengan arah yang cukup baik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah mengimplementasikan beberapa langkah seperti pemasangan batu penahan ombak serta melakukan sosialisasi awal terkait rencana penanaman mangrove. Namun, efektivitas kebijakan masih terkendala oleh belum terealisasinya secara konkret program penanaman mangrove dan ketiadaan pelatihan teknis atau sosialisasi lanjutan mengenai mitigasi abrasi kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah dirancang

dan mulai dijalankan, implementasinya belum sepenuhnya optimal dalam menjawab kebutuhan lapangan secara berkelanjutan.

Organisasi Pelaksana

Menurut Korten dalam Nim (2019), organisasi atau lembaga pelaksana merupakan unit pemerintahan yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Pihak yang ditunjuk memiliki tugas untuk menjalankan berbagai tindakan yang diperlukan, termasuk menyosialisasikan serta menerapkan aturan-aturan yang terdapat dalam kebijakan tersebut.

Indikator organisasi pelaksana dalam kebijakan penanggulangan bencana abrasi di Pantai Ancol Maras, Kabupaten Seluma, menilai keterlibatan organisasi atau lembaga dalam upaya penanggulangan abrasi, termasuk keberadaan lembaga yang secara rutin menangani risiko abrasi.

Hasil wawancara dan penelitian lapangan menunjukkan bahwa beberapa organisasi dan lembaga yang terlibat dalam penanggulangan abrasi di Pantai Ancol Maras, Kabupaten Seluma, antara lain BPBD, Pemerintah Desa, dan Dinas Sosial, yang memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak. Selain itu, organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna di Desa Padang Bakung juga berkontribusi dalam upaya tersebut.

Hingga kini, belum ada organisasi atau lembaga yang secara rutin menangani abrasi di Pantai Ancol Maras, Kabupaten Seluma. Namun, dalam upaya memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, BPBD, Pemerintah Desa, dan Dinas Sosial Kabupaten Seluma

kerap terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penanggulangan risiko abrasi di Pantai Ancol Maras pada indikator *organisasi pelaksana*, jika merujuk pada teori implementasi David C. Korten dalam Tarigan (2008), menunjukkan bahwa kinerja pelaksana masih belum optimal. Rendahnya keterlibatan lintas sektor, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta, menjadi hambatan utama. Hingga saat ini, belum terdapat organisasi yang secara khusus dan berkelanjutan menangani isu abrasi. Aktivitas pemerintah desa dan BPBD masih terbatas pada penyaluran bantuan sosial, sementara langkah-langkah teknis konkret dalam mitigasi abrasi belum diimplementasikan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan kurangnya prioritas terhadap penanganan risiko lingkungan secara struktural.

Sasaran Kebijakan

Menurut Smith dalam Nim (2019), kelompok sasaran (target group) merujuk pada individu atau pihak yang secara langsung terdampak oleh kebijakan dan diharapkan menyesuaikan pola interaksi mereka sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Indikator sasaran kebijakan dalam implementasi penanggulangan bencana abrasi di Pantai Ancol Maras, Kabupaten Seluma, difokuskan pada evaluasi efektivitas tindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi abrasi. Selain itu, penulis juga ingin menilai tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan serta

keterlibatan mereka dalam upaya penanggulangan abrasi.

Berdasarkan wawancara dan penelitian lapangan yang dilakukan, diketahui bahwa abrasi di Pantai Ancol Maras, Kabupaten Seluma, masih belum teratasi meskipun telah dilakukan pemasangan batu penahan ombak. Saat ini, banyak batu penahan ombak yang sudah tenggelam, sehingga abrasi terus berlanjut dan semakin parah.

Terkait kesadaran dan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi risiko abrasi, diketahui bahwa mereka memiliki tingkat kepedulian yang cukup tinggi. Hal ini tercermin dari partisipasi aktif mereka dalam berbagai kegiatan, seperti sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah.

Analisis mendalam terhadap indikator sasaran kebijakan dalam implementasi penanggulangan risiko abrasi di Pantai Ancol Maras, Kabupaten Seluma, mengungkap adanya ketimpangan antara kepedulian masyarakat dan pemahaman substantif terhadap isu abrasi. Merujuk pada teori implementasi kebijakan David C. Korten dalam Tarigan (2008), indikator sasaran mencakup sejauh mana kelompok sasaran memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam kebijakan yang diimplementasikan. Dalam kasus ini, meskipun masyarakat menunjukkan sikap responsif secara emosional terhadap abrasi, respons kognitif dan partisipatif mereka masih rendah karena minimnya pengetahuan dan keterlibatan teknis.

Abrasi yang masih berlangsung, bahkan setelah adanya intervensi teknis berupa batu

penahan ombak yang kini telah tenggelam, mengindikasikan adanya kesenjangan antara output dan outcome kebijakan. Artinya, meskipun ada aktivitas fisik dari kebijakan, hasil akhirnya tidak memberikan dampak signifikan terhadap tujuan perlindungan pantai. Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme evaluasi dan pemeliharaan infrastruktur mitigasi. Di sisi lain, harapan masyarakat yang sepenuhnya bertumpu pada pemerintah memperlihatkan ketergantungan struktural, yang seharusnya dapat dikoreksi melalui strategi pemberdayaan.

Dalam konteks administrasi publik, kondisi ini mencerminkan defisit kolaboratif antara aktor negara dan warga. Pemerintah daerah, khususnya BPBD, belum berhasil membentuk kemitraan adaptif dengan masyarakat, padahal dalam konteks kebijakan publik yang bersifat partisipatoris, sasaran bukan hanya objek kebijakan, tetapi juga aktor penggerak. Kurangnya pelibatan masyarakat dalam tahap implementasi juga menunjukkan lemahnya pendekatan bottom-up yang esensial dalam pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas (community-based disaster risk management).

Dengan demikian, tanpa adanya peningkatan kapasitas masyarakat dan integrasi yang kuat antara warga dan pemerintah, indikator sasaran dalam kerangka implementasi kebijakan akan terus menjadi titik lemah yang menyebabkan kebijakan gagal mencapai efektivitas substantif. Pemerintah harus memfokuskan ulang pendekatannya dari sekadar

tanggap darurat menuju pembangunan resiliensi masyarakat secara berkelanjutan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan abrasi di Pantai Ancol Maras, Kabupaten Seluma, belum berjalan secara optimal. Berdasarkan pendekatan implementasi kebijakan menurut David C. Korten, ditemukan hambatan pada aspek kebijakan, organisasi pelaksana, dan sasaran kebijakan. Program yang dirancang seperti penanaman mangrove belum terealisasi, koordinasi antarinstansi masih lemah, dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya didukung oleh pemahaman yang memadai. Kondisi ini berkontribusi pada terus berlanjutnya abrasi, terutama karena kurangnya tindak lanjut teknis terhadap infrastruktur yang rusak seperti batu penahan ombak.

Diperlukan optimalisasi implementasi kebijakan melalui percepatan realisasi program mitigasi, penguatan koordinasi antarorganisasi pelaksana, dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi. Pemerintah daerah juga diharapkan segera mengambil tindakan teknis yang konkret untuk memperbaiki infrastruktur penahan abrasi dan mencari solusi alternatif berbasis ekosistem pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Harisma, H., Anshari, E., Masri, M., Deniyatno, D., Okto, A., Wahab, W., & Mili, M. Z. (2023). Pengurangan Risiko Abrasi Pantai Oleh Gelombang Ekstrim Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa

- Wawohara Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Ejoin: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(9), 1008-1018.
- Juliswara, Vibriza., Manik, Rusman. Rupinus., & Karna Djaja, Djuniawan. (2022). Implementasi Kebijakan Publik tentang Model Pengurangan Resiko Bencana dengan Pendekatan Pada Masyarakat Dalam Program Desa Tahan Bencana Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Implementasi Kebijakan Publik tentang Model Pengurangan Resiko Bencana dengan Pendekatan Pada Masyarakat Dalam Program Desa Tahan Bencana Di Daerah Istimewa Yogyakart, 2(21).
- Moleong, Lexy J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- NIM, S. S. S., Sunyata, L., & Patriani, I. (2019). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun Di Desa Batu Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu. PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 8(4).
- Nur, M. Tajudin. (2004). Abrasi Pantai dan Proses Bermigrasi. Desertasii Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH). Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta.
- Perda Kabupaten Seluma No. 7 Tahun 2015 mengatur penanggulangan bencana daerah melalui pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- Permatasari, I. N. (2021). Kajian resiko, dampak, kerentanan dan mitigasi bencana abrasi dibeberapa pesisir indonesia. Jurnal Riset Kelautan Tropis (Journal Of Tropical Marine Research)(J-Tropimar), 3(1), 43-53.
- Putera, Roni Eka., Valentina, Tengku Rika., & Rosa, Siti Anisa Silvia. (2020). Implementasi kebijakan penataan ruang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya pengurangan resiko bencana di Kota Padang. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 9(2), 155-167.
- Rachmalia, R., & Ridwan, A. (2021). Upaya Pengurangan Risiko Bencana Abrasi Pantai Berbasis Komunitas. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan, 5(2).
- Rhama, B. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kota Palangka Raya Tahun 2017-2028. Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan, 11(1), 84-93.
- Rozaldi, Muhammad Hilmi., & Anwar, Muhammad Khoirul. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Di Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang. Jurnal Media Administrasi, 9(1), 85-88.
- Tarigan., & Akib, Haedar. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. Universitas Pepabari Makasar, 1, 117.
- Usman & Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis

Kurikulum. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.

Wirartha, I Made. (2006). Metodologi
Penelitian Sosial Ekonomi.
Yogyakarta: CV.Andi Offset.